

E-GOVERNMENT
PEMERINTAH DAERAH

KOMINFO

BERITA & OPINI PUBLIK

Triwulan I
2017



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Jln. Soa-Siu Dok II Bawah Jayapura

www.diskominfo.papua.go.id

email : ppiddiskominfo@go.id



DAFTAR ISI

I. HARIAN CENDERAWASIH POS	Hal
- Optimis Implementasikan e-Government.....	1
- Memberdayakan Kampung Melalui TIK.....	2
- Launching E-Government Terintegrasi Dimatangkan.....	3
- (1) Siap Terapkan Sasaran Kinerja Pegawai Online.....	4
- (2) KI Papua Dorong Setiap Badan Publik Miliki Website.....	4
- Siap Dilaunching, Bertujuan Hindari Praktik Korupsi.....	5
- (1) Kabupaten Diminta Dukung Proyek Papua Ring.....	6
- (2) Diskominfo Bagikan 742 Antena TV Kepada Masyarakat.....	6
- Internet Gratis, Direspon Pelajar dan Mahasiswa.....	7
- (1) Tahun Terakhir, Sarana Komunikasi Bisa Dirasakan Semua Masyarakat	8
- (2) Menuju Smart City, Jayapura Akan Gunakan Palapa Ring.....	8
- Pertama di Indonesia Timur, Permudah Dokumen Musrenbang.....	9
- KPK Ingatkan Pemprov Implementasi E-Government.....	10
- (1) April, Pemkot Luncurkan E-Warung.....	11
- (2) Polri Gandeng Kemkominfo Ungkap Kasus Pedofil Di Medsos.....	11
- Dinsos Gelar Sosialisasi E-Warung Bagi PKH.....	12
- 2018, Semua Distrik Sudah Nikmati Jaringan Komunikasi.....	13
- Kominfo Siapkan Aplikasi Informasi Untuk Asian Games.....	14
II. HARIAN PAPUA POS	
- Kominfo Papua Akan Fasilitasi Kabupaten/Kota Memanfaatkan Aplikasi Berbasis Web.....	15
- Menkominfo Akui Internet di Papua Mahal.....	16
- Gubernur Minta Bupati dan Walikota Dukung Proyek Palapa Ring.....	17
- (1) KPK Gandeng APIP Awasi Pembangunan Anggaran di Daerah.....	18
- (2) Papua Merupakan Provinsi Ke Empat Luncurkan E-Government.....	18
- (1) Kemendagri Bentuk Pembina Aplikasi “e-Planning”.....	19
- (2) Kemendagri Bentuk Tim Pembina E-Planning.....	19
- Menkominfo: Kalau Incar Jangkauan, Tunggu 700 MHz Merdeka.....	20
- Pelaku Usaha Biak Diajak Manfaatkan Internet.....	21

Judul : Optimis Implementasikan e-Government

Sumber : Harian Cenderawasih Pos

Tanggal : 29 Desember 2016

Cenderawasih Pos • Kamis, 29 Desember 2016



FOTO BERSAMA : Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, SE, MM ketika berfoto bersama dengan Kadiskominfo Papua, Kansiana Salle, SH, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua di Jakarta, Reky D Ambrauw, S.Sos, M.Si, Kadispenda Papua, Dr Muhammad Ridwan Rumsukun, SE, MM dan Kepala BKD Papua, Drs Nicolaus Wenda, MM di Kantor Gubernur Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Optimis Implementasikan e-Government

JAYAPURA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Papua tetap optimis implementasi e-Government pada Maret 2017.

Demikian tegas Kepala Diskominfo Papua, Kansiana Salle, SH ketika ditemui di Kantor Diskominfo Papua, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, selaku SKPD yang menjadi pionir dalam e-government ini pihaknya optimis mampu menjalankan tugas dengan baik.

Sebelumnya, Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, SE, MM mengharapkan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang telah mengikuti workshop e-Government sejak tanggal 23 November hingga 25 November mengimplementasikan apa yang didapatkan dari workshop tersebut.

"Inti dari pada kegiatan ini adalah setiap SKPD yang mengikuti kegiatan ini adalah bagaimana SKPD yang berhubungan langsung dengan program e-Government yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), PTSP, Badan Kepegawain Daerah (BKD) serta Dinas Kominfo diharapkan dapat mengimplemetasikan hasil dari MoU e-Government," ungkapnya.

Elysa Auri, mengharapkan implementasi dari MoU e-Government paling tidak sudah dijalankan di SKPD mulai bulan Januari, meskipun pihak Diskominfo sendiri menganalisis program tersebut baru bisa berjalan pada bulan Maret tahun 2017.

"Kita harapkan konsistensi dari teman-teman SKPD," ujarnya. (yan/lay)

Judul : Memberdayakan Kampung Melalui TIK

Sumber : Harian Cenderawasih Pos

Tanggal : 13 Februari 2017

Memberdayakan Kampung Melalui TIK



Kapala BKD Kabupaten Jayapura, Alex Ramboblar saat beresam dengan Sekda Kabupaten Jayapura usai membuka kegiatan kepegawaian di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura belum lama ini.

Kabupaten Jayapura Ditetapkan Sebagai Kabupaten Digital

SENTANI-Kabupaten Jayapura telah dicantumkan menjadi kabupaten digital di Papua dan Indonesia bagian timur oleh sebuah bu saat ini saat ini sedang dilakukan persiapan. Kapala BKD Kabupaten Jayapura, Alex Ramboblar, Sos.M.Si mengatakan khusus bagian kepegawaian tahap demi tahap sudah mulai lebih jauh meningkat.

menunggu lama lagi. "Kabupaten Jayapura saat ini sedang mempersiapkan diri semua mekik kita sedikit memenuh kesediaan karena beberapa waktu lalu kabel optik sempat putus," ucapnya.

Langkah yang telah dibarui ini menantinya diberikan apresiasi oleh Kepala BKN Pusat karena mengangkat Kabupaten Jayapura

sele jangkauan kita akan, tetapi akan kabupaten baru pemukiman siap berarti kita lebih siap lagi," tuturnya.

la memantapkan, kedepan ada sebuah aplikasi khusus yang akan diarahkan kepada pegawai untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. "Pegawai yang mempunyai handphone digital yang sudah

SENTANI- Festival DesTIKA (Desa Teknologi, Informasi dan Komunikasi) yang diselenggarakan di Khatolote, Kampung Asei Besse, Distrik Sentani Timur tahun 2016 lalu dianggap sukses mengingat Kabupaten Jayapura terbatas dalam mengakses teknologi, informasi dan komunikasi di Provinsi Papua.

Sukses ini terwujud melalui penghargaan khusus yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI sebagai Kabupaten yang mendukung terlaksananya pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Desa. Penghargaan yang sama juga diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Woro Indah Widhiastuty, staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengatakan ada sejumlah Kabupaten di Indonesia yang mendukung penuh pemberdayaan desa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), termasuk Kabupaten Jayapura, Papua dan Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Untuk ini sebagai bentuk kepedulian Kementerian, maka daerah-daerah yang peduli ini diberikan reward atau penghargaan atas partisipasi pemerintah daerahnya.

Penyelenggaraan Festival DesTIKA ini bukan sekedar festival saja. DesTIKA erat berkaitan dengan Program Dana Desa/ Kampung yang diyakini bakal bermanfaat untuk masyarakat pedesaan/perkampungan, jika pengelolannya tak transparan dan akuntabel.

Ditegaskan oleh Budiman Sujatmiko, fraksiur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Desa yang juga Anggota Komisi II DPR RI, Budiman Sujatmiko: DesTIKA harus ditinjau oleh pemanfaatan teknologi terbaru. "Teknologi harus dimanfaatkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut. Jika tidak, maka dana itu akan sia-sia karena terbuka kemungkinan penyelewengan," tutur Budiman.

Menurut Budiman, festival DesTIKA

Kampung-kampung adat itu nantinya bisa berperan dalam menjaga transparansi anggaran desa/atau kampung yang diorganisir oleh program DesTIKA.

Hal ini, menurut Awotawaw sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk meningkatkan eksistensi dan peran lembaga adat dan agama dalam memajukan masyarakat adat. Keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pembangunan menjadi lebih terbuka dengan ketersediaan aplikasi teknologi, informasi dan komunikasi dalam program DesTIKA.

Sayangnya, dalam pelaksanaannya, program ini terkendala ketersediaan sinyal internet yang masih sangat terbatas.

Penduduk di Kampung Sosri memang sudah banyak yang memiliki Handphone, walaupun belum masuk kategori smartphone. Namun untuk mendapatkan pulsa telepon ataupun pulsa data yang disediakan oleh provider telekomunikasi, penduduk kampung harus berjalan ke kota terdekat yang jaraknya lebih dari 15 kilometer.

"Untuk menunjang lancarnya komunikasi dan informasi dari daerah ke pusat memang diperlukan fasilitas yang baik. Dengan demikian semua laporan terkait pembangunan yang dilakukan di daerah, mulai dari kampung hingga kabupaten dapat dilaporkan secepat-cepatnya dan akurat kepada pemerintah pusat," ujar Awotawaw.

la yakin, intervensi ini akan terasimilasi seiring kebijakan Presiden Joko Widodo yang berkeinginan kuat membangun Papua agar sama dengan wilayah lainnya di Indonesia. Sebab DesTIKA merupakan salah satu perwujudan Nawacita butir ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa/kampung dalam Keluarga Negara Kesatuan.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah desa atau kampung teknologi, informasi dan komunikasi merupakan sarana untuk memberdayakan komunitas



Judul : Launching E-Government Terintegritas Dimatangkan

Sumber : Harian Cenderawasih Pos

Tanggal : 20 Februari 2017

Launching E-Government Terintegrasi Dimatangkan

JAYAPURA-Guna mematangkan persiapan launching e-Musrenbang, e-Budgeting, e-Perijinan dan e-Samsat, maka Tim Kelompok Kerja (Pokja) Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Pemprov Papua menyambangi Kantor KPK di Kuningan Jakarta, untuk membahas rekomendasi KPK terkait e-Government terintegrasi.

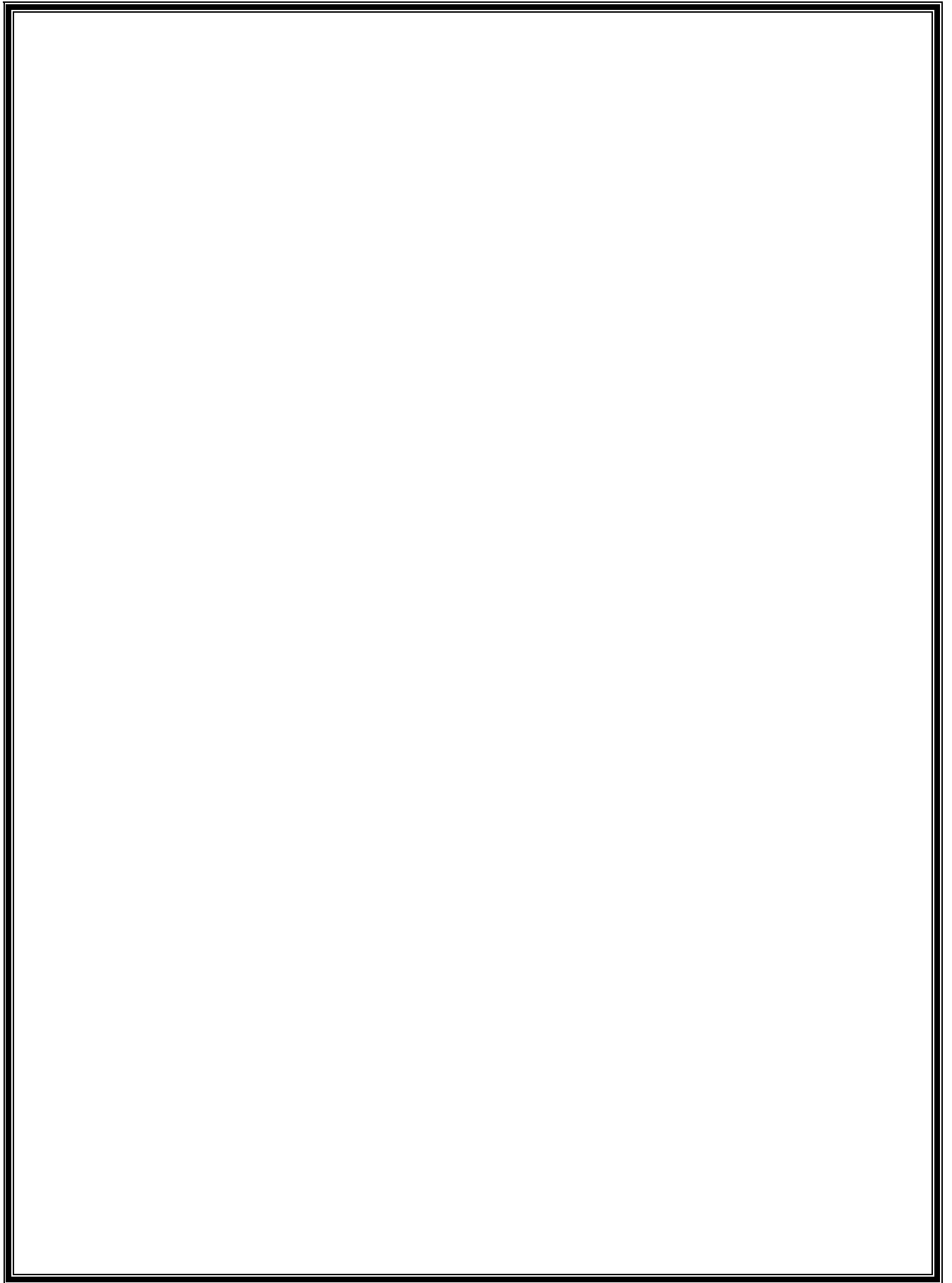
Dalam pertemuan bersama Ketua



Elysa Auri menjelaskan beberapa kegiatan telah diikuti oleh pihaknya mulai dari monitoring evaluasi sampai dengan penandatanganan MoU Gubernur Papua dgn Wali Kota Surabaya utk e-musrenbang dan e-budgeting serta MoU Gubernur Papua dgn Gubernur Jawa Barat utk e-Perijinan, e-samsat dan e-dari pengembangan aplikasi

jelasan kesiapan launching e-Perijinan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu, Jhon Way, Snt, MSI

Selain itu untuk kesiapan e-Samsat dijelaskan oleh Kabid Pengembangan Dispeda, Setiyo Wahyudi, SE, MM. Adapun demo aplikasi e-musrenbang hingga e-budgeting oleh programmer Suliستیو Sudarmono, SKom, MCM.



Judul : - Siap Terapkan Sasaran Kinerja Pegawai Online

- KI Papua Dorong Setiap Badan Publik Miliki Website

Sumber : Harian Cenderawasih Pos

Tanggal : 21 Februari 2017

Siap Terapkan Sasaran Kinerja Pegawai Online

JAYAPURA - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Drs Nicolaus Wenda, MM mengungkapkan pihaknya siap untuk menerapkan sistem aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara elektronik atau e-SKP.

Melalui e-SKP ini bisa dilakukan penilaian terhadap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua, bahkan sistem ini direncanakan akan diterapkan di masing-masing SKPD.

Menurutnya, dengan hadirnya aplikasi ini maka sistem penilaian administrasi kepegawaian di Pemprov Papua akan dinilai berdasarkan prinsip-prinsip yang objektif,

terukur secara kuantitatif dan kualitatif serta akuntabel.

Artinya, kata Wenda sistem aplikasi yang akan bekerja menilai prestasi kerja dari seorang pegawai negeri sipil, akan meminimalisir KKN di tingkat administrasi kepegawaian.

"Dengan aplikasi ini, maka sistem penilaian tidak bisa dipengaruhi oleh penilaian secara subjektif pribadi dari pejabat penilai, sebab sistem akan bekerja. Bila salah dalam menilai maka sistem akan menolak data dari pegawai tersebut," katanya di Kantor Gubernur Papua, Jumat (20/1).

Bahkan sistem kenaikan pangkat jabatan, hingga pembayaran tunjangan pengabdian bersyarat (TPB)

serta tunjangan lainnya akan dibayarkan sesuai dengan sistem penilaian secara online, artinya sistem masuk kantor, hingga pulang kerja, termasuk apa yang dikerjakan selama sehari, akan dinilai oleh sistem atau aplikasi online ini.

"Jadi Gubernur rencanakan naikan TPB tahun depan, namun SKPD tidak bisa sembarang membayar, sebab harus membayar sesuai dengan kinerja yang ditunjukkan oleh pegawai, apa yang dia kerja hari ini, itu yang akan dibayar, dilain sisi pimpinan juga tidak bisa sembarang menahan hak dari staf, karena pembayaran berdasarkan aplikasi," tambahnya. (yan/lay)

KI Papua Dorong Setiap Badan Publik Miliki Website

JAYAPURA - Ketua Komisi Informasi (KI) Papua mengatakan KI Papua bakal mendorong badan publik di provinsi dan kabupaten/kota untuk membuat website yang menjadi indikator utama untuk masuk nominasi 10 besar dalam peningkatan tingkat nasional.

"Web ini jadi indikator utama dalam penilaian sehingga akan kita dorong serta motivasi kepada pimpinan badan publik dan kabupaten untuk sesegera mungkin bentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bikin website," ungkapnya ketika ditemui di Jayapura, kemarin.

Dikatakan, keberhasilan Papua masuk nominasi 15 besar sebagai provinsi paling terbuka 2016, merupakan upaya dan kerja keras KI Papua, Etnas Kominfo dan serta Bero Humas dan Protokol.

"Dimana kita mendorong kabupaten dan kota serta badan publik untuk berupaya terbuka, terutama membentuk PPID," katanya.

Kata Maibai, pada tahun ini Komisi Informasi akan memperbaiki advokasi kabupaten yang belum memiliki advokasi. Sebab, pihaknya meyakini masih banyak pemda yang belum tahu prosedur pembentukan PPID.

"Contoh pada waktu kunjungan terakhir saya ke Supiori, dimana saya melihat Sekda sudah mengerti harus segera dibentuk PPID. Sayangnya yang bersangkutan belum tahu prosedur pembentukannya bagaimana," ujarnya.

Ditambahkan, kedepan KI dalam perencanaan program kerja dalam tahun ini akan lebih mendorong ke arah itu, seperti sosialisasi prosedur pembentukan PPID ke Pemda. Sehingga kabupaten dan badan publik bisa tahu bagaimana menyipkan PPID. (yan/lay)

Judul : Siap Dilaunching, Bertujuan Hindari Praktik Korupsi

Sumber : Harian Cenderawasih Pos

Tanggal : 22 Februari 2017

Ketika Pemprov Komitmen Berlakukan E-Government Terintegrasi

Siap Dilaunching, Bertujuan Hindari Praktik Korupsi

Tinggal menghitung hari atau tepat 8 Maret nanti, Pemprov Papua bakal memberlakukan e-government terintegrasi yang mana tata kelola pemerintahan bakal berbasis elektronik. Bagaimana persiapannya?

Laporan: Yamander Yensenem - Jayapura

Setelah melaksanakan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan Juni 2016, lalu dimana KPK merekomendasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparansi dan akuntabel dengan program e-government terintegrasi.

Bahkan tercatat Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH hadir langsung di Pendopo Kanir Bupati Sidorjo untuk menandatangani MoU Implementasi e-Government dengan Pemerintah Kota Surabaya serta Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik bersama Pemerintah Kabupaten Sidorjo pada 8 November 2016.

*Baca SIAP... Hal 11



BINCANG-BINCANG: Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH didampingi Sekda Papua, TEA Hery Dosimee, SIP, MKP ketika berbincang-bincang dengan Wakil Ketua KPK Bidang Perindakan, Ijen (Purn), Basaris Panjaitan, SH, MH di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, beberapa waktu lalu.

SIAP...

Selanjutnya pada 25 November 2016, Pemprov Papua kembali menandatangani MoU dengan Pemprov Jawa Barat terkait dengan pelaksanaan e-planing, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Setelah melalui berbagai tahapan termasuk pertemuan terakhir antara KPK RI yang diwakili oleh Kepala Satuan Tugas Tim Korupsi Pencegahan KPK di Provinsi Papua Tri Gunawirya bersama dengan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Pemrov Papua, maka launching E-Government terintegrasi dipastikan bakal dilaksanakan pada 8 Maret 2017 nanti.

oleh pihaknya mulai dari monitoring evaluasi sampai dengan penandatanganan MoU Gubernur Papua dgn Walikota Surabaya utk e-musrenbang dan e-budgeting serta MoU Gubernur Papua dgn Gubernur Jawa Barat utk e-Perijinan, e-samsat dan e- dari pengembangan aplikasi Perencanaan, Penganggaran, Perijinan dan Pendapatan melalui Samsat Pemprov Papua.

"Pemrov siap untuk melaunching pada tanggal 8 Maret 2017 dimana kita melaunching e-musrenbang, e-budgeting, e-Perijinan & e-samsat," jelasnya.

Pemberlakuan ini tentu bakal semakin maksimal mengikat jika seluruh program dan kegiatan benar-benar terintegrasi dalam satu system diharapkan memudahkan fungsi control dari pimpinan daerah dalam hal ini gubernur. e-samsat yang menjadi perangkat aplikasi e-Samsat sudah sudah dilaksanakan di Kabupaten dan Kota, terutama di 17 Samsat yang dimiliki oleh Provinsi Papua, maka tahap demi tahap semua Samsat sudah bisa melaksanakan aplikasi e-Samsat di seluruh Provinsi Papua.

"Nantinya Pembayar pajak kendaraan bermotor tahunan, wajib pajak hanya menggunakan mesin ATM Bank Papua, sehingga sangat membantu masyarakat atau wajib pajak, dari sisi efisien waktu dan tenaga, fleksibel," jelasnya.

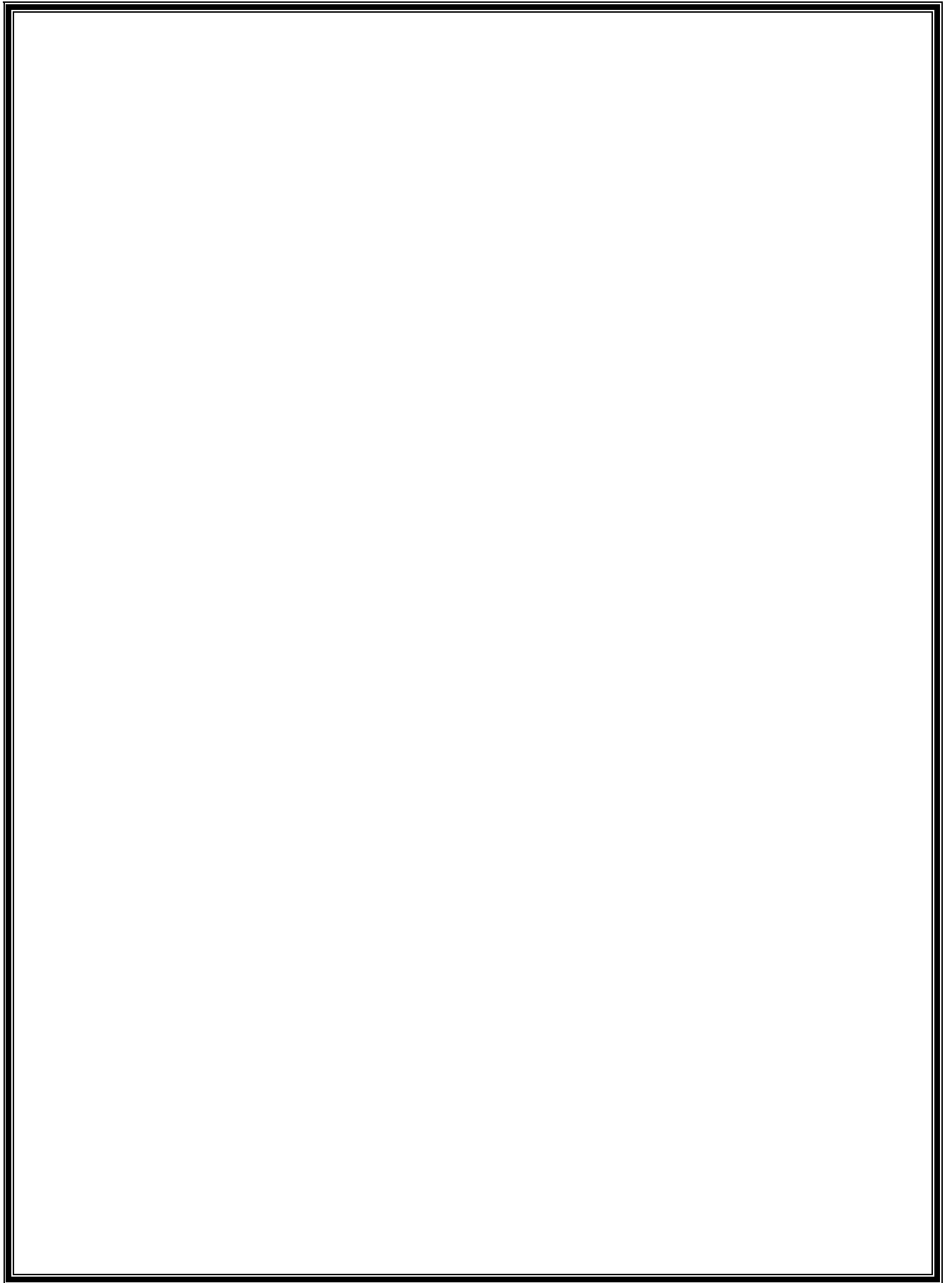
Sertifikat itu, Kepala Diskominfo Prov Papua, Kanstano Salle, SH, mengatakan sebenarnya untuk jaringan internet, Diskominfo Provinsi Papua, sudah siap untuk mendukung penerapan aplikasi yang akan dimanfaatkan oleh SKPD di Provinsi Papua, baik aplikasi yang diadopsi dari Kota Surabaya, beberapa waktu lalu maupun

Judul : - Kabupaten Diminta Dukung Proyek Palapa Ring
- Diskominfo Bagikan 742 Antena TV Kepada Masyarakat
Sumber : Harian Cenderawasih Pos
Tanggal : 25 Februari 2017

Kabupaten
Diminta Dukung
Proyek Palapa Ring

JAYAPURA - Pentingnya pemba-





Judul : Internet Gratis, Direspon Pelajar dan Mahasiswa

Sumber : Harian Cenderawasih Pos

Tanggal : 27 Februari 2017

Internet Gratis, Direspon Pelajar dan Mahasiswa

SENTANI-Guna membuka ilmu pengetahuan yang dilandaskan kepada teknologi maka hampir setahun ini Pemerintah Distrik Sentani Timur menyediakan internet gratis bagi masyarakat, pelajar dan mahasiswa.

Fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Distrik Sentani Timur ini didapat dari program pemerintah Provinsi Papua tentang internet gratis bagi masyarakat dan fasilitas ini berjalan 24 jam di kantor Distrik Sentani Timur.

Sekretaris Distrik Sentani Timur, Alfred Deda, SE mengatakan, program ini sudah berjalan beberapa bulan dan kalau sampai bulan Juli maka setahun program internet gratis ini terpasang di Distrik Sentani Timur. "Operasi internet gratis ini sudah mulai dari bulan Juli tahun 2016. Dan internet ini selalu online 24 jam bahkan tanpa password," sebutnya.

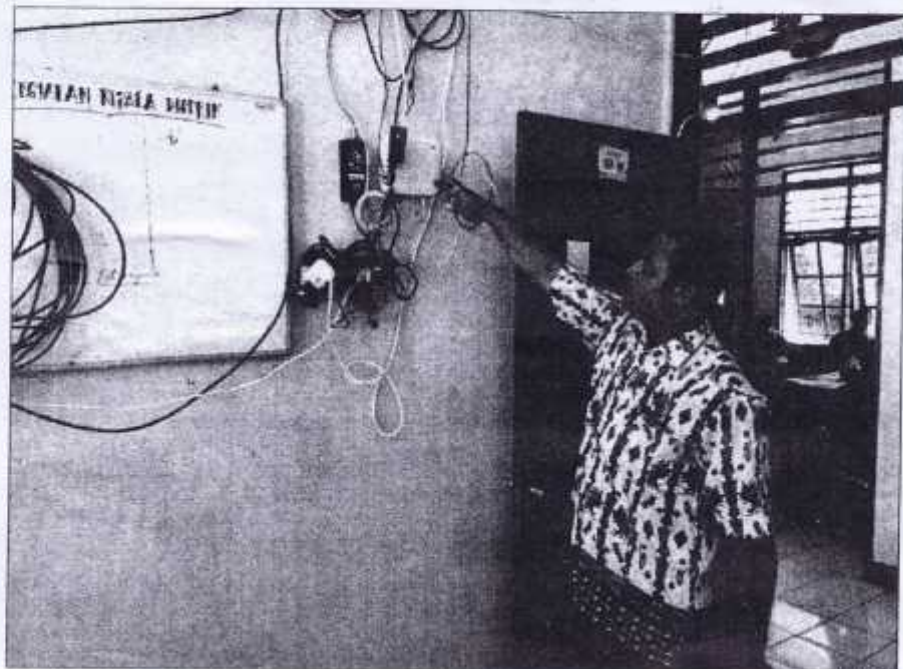
Menurutnya, alasan pihaknya tidak menggunakan password karena fasilitas ini milik rakyat dan harus dapat digunakan secara utuh

oleh masyarakat. "Kami pemerintah membantu masyarakat yang tidak memiliki internet dengan fasilitas ini maka mereka dapat mengetahui isi duni melalui fasilitas ini," tuturnya. "Juga pelajar dan mahasiswa dapat mencari tugas-tugas mereka disini tanpa harus menggunakan biaya tetapi gratis," tambahnya.

Ia menyampaikan, jam-jam 15.00-17.00 WIT, di kantor distrik ramai dengan anak sekolah, mahasiswa dan masyarakat yang nongkrong di sini untuk menggunakan fasilitas yang disiapkan.

Oleh sebab itu, pihaknya telah menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Distrik Sentani Timur supaya dapat memaksimalkan fasilitas ini dengan baik dengan datang ke kantor distrik untuk menggunakannya. "Kami sudah mengimbau kepada masyarakat untuk dapat menggunakan fasilitas ini dengan maksimal. Karena fasilitas ini ada untuk membantu masyarakat disini," pungkasnya. (yud/wen)

Sekretaris
Distrik
Sentani
Timur,
Alfred Deda
menunjukkan
modem
wifi Distrik
Sentani
Timur, Jumat
(24/2) lalu.



Judul : - Tahun Terakhir, Sarana Komunikasi Bisa Dirasakan Semua Masyarakat
- Menuju Smart City, Jayapura Akan Gunakan Palapa Ring

Sumber : Harian Cenderawasih Pos

Tanggal : 03 Maret 2017

Cenderawasih Pos,
Jumat, 03 Maret 2017

Tahun Terakhir, Sarana Komunikasi Bisa Dirasakan Semua Masyarakat

BIAK-Di tahun terakhir kepemimpinan Bupati Blak Numfor Thomas Ondy, SE, MM bersama Wakil Bupati Blak Numfor, Herry Naap, M.Pd bertekad memenuhi kebutuhan sarana komunikasi bagi seluruh masyarakat.

Kepada wartawan usai menggelar ibadah syukuran tiga tahun kepemimpinannya di Taman Adam Manggara Blak, Kamis (2/3) kemarin, Bupati Thomas Ondy meminta dukungan kepada masyarakat terkait pembangunan yang saat ini dan yang akan dikerjakan, termasuk membangun sarana BTS maupun menara di beberapa tempat.

"Bencana tahun ini hingga Desember, sarana komunikasi bisa terjangkau di seluruh wilayah di Kabupaten Blak Numfor," ungkap Thomas Ondy.

Diaku, selama tiga tahun pemerintah daerah sudah bekerja di semua sisi baik pada sektor wajib maupun pendukungnya. Seperti dalam bidang komunikasi, transportasi, infrastruktur, pembangunan sarana tempat tinggal, kebutuhan listrik dan air bersih, dan pelayanan pada bidang kesehatan hingga pendidikan.

"Sudah tiga tahun kita bekerja di semua lini seperti infrastruktur, rumah, air bersih, listrik, jembatan, bidang pendidikan, kesehatan, dan sarana pendukung lainnya baik di bidang perikanan dan industri perdagangan.

Kata Thomas Ondy, saat ini berbagai sarana sudah disiapkan



Bupati Blak Numfor Thomas Ondy, SE, MM bersama Wakil Bupati Herry Naap, MPd, Pdt Sekda Blak Numfor, Dr. Enlas Rumbewas dan para Ketua Paguyuban dan tokoh perempuan saat hendak melakukan pemotongan tumpeng pada HUT 3 tahun kepemimpinannya di Taman Adam Manggara Blak, Kamis (2/3) kemarin.

dan misi Blak Bangkit Mandiri dan Sejahtera dan dituangkan dalam berbagai kegiatan.

Katanya, sejak Tahun 2014-2017 berbagai sarana di seluruh wilayah Kabupaten Blak Numfor telah dibangun. Meski menantang dinamika dalam pembangunan, pemerintah selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan. Yaitu dari sektor luas wilayah, kondisi geografis serta dukungan sarana prasarana, dan yang paling uras adalah belum terpasangnya jaringan telekomunikasi yang menyeluruh di Kabupaten Blak Numfor.

Selain itu, kondisi geografis di Blak juga menyisipkan tantangan tersendiri, beberapa wilayah kepulauan seperti perjalanan panjang dan cukup jauh.

"Pada waktu sisa ini Pemerintah Daerah akan menyelesaikan pekerjaan lanjutan, seperti pembangunan jalan, saluran air, listrik, rumah, dan lainnya," jelasnya.

Disamping itu juga kata Bupati, Pemkab sudah berupaya melokalkan dana ke bank-bank. Juga sudah mengundang berbagai investor untuk datang ke Blak, namun sampai hari ini dukungan dua hal yang harus dipenuhi dan masih menjadi catatan adalah sarana kelistrikan dan persoalan tanah bagi para investor, artinya keamanan bagi para investor yang belum bisa

Judul : Dari Launching E-Government Pemerintah Provinsi Papua
(bagian I)

Sumber : Harian Cenderawasih Pos

KAMIS | 09 MARET 2017

Dari Launching E-Government Pemerintah Provinsi Papua (Bagian- I) Pertama di Indonesia Timur, Permudah Dokumen Musrenbang

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua resmi tercatat sebagai Provinsi ke-4 yang memberlakukan e-government di Indonesia, selain Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara dan Bengkulu. Apa saja yang manfaat dari program ini?

Laporan : Yamander Yensenem , Jayapura

Komitmen untuk melaksanakan pemerintahan yang transparan yang akuntabel jadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua di era kepemimpinan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM.

Salah satunya dengan pemberlakuan e-Government terintegrasi yang tercatat pertama di Indonesia Timur, pemberlakuan ini tidak lepas dari

kondisi saat ini, yakni dokumen rencana anggaran yang tidak konsisten, sulit untuk mengendalikan proses usulan dan evaluasi anggaran, waktu penyusunan anggaran yang lama, harga satuan item belanja yang tidak standar, data Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang tidak komprehensif pada pembahasan dengan legislatif.

►Baca PERTAMA: Hal 11



E-PapuaMusrenbang. Kepala UPT Data dan Analisis Pembangunan Bappeda Provinsi Papua, Andry, SIP,MSI ketika memberi penjelasan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Wakil Ketua KPK, Irjen (purn) Basaria Pandjaitan, SH, MH di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, kemarin. c

Selain itu, rekap anggaran per rekening belanja yang tidak real time serta pelayanan belum cepat dan tidak informatif (khususnya Samsat dan Pelayanan Satu Pintu).

Pada hal, di era keterbukaan informasi, seharusnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini menjadi landasan bagi Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH untuk meluncurkan e-Government Papua, sebuah system pelayanan berbasis online yang menjadi salah satu program primadona di era kepemimpinannya ini.

E-Government Papua ini agak berbeda dan menarik jika dibandingkan dengan e-Government yang diberlakukan di Jawa Barat, karena berbasis kearifan lokal seperti system perencanaan dan penganggaran, dimana untuk

e-Musrenbang dikenal dengan nama e-PapuaPu Musrenbang.

Aplikasi ini digunakan pada pelaksanaan Musrenbang yang mengawal usulan hasil Musrenbang kabupaten/kota ke Musrenbang Provinsi, serta mengintegrasikan perencanaan kabupaten/kota dan provinsi." E-Musrenbang ini akan menghasilkan dokumen-dokumen usulan pendanaan kabupaten/kota yang dibiayai dari APBD Provinsi (Rencana OPD Provinsi, Usulan Rencana Definitif Otonomi Khusus 90 persen, Dana Urusan Bersama, Otsus Infrastruktur)," ungkap Kepala UPT Data dan Analisis Pembangunan Bappeda Provinsi Papua, Andry, SIP,MSI ketika memberi penjelasan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Wakil Ketua KPK, Irjen (purn) Basaria Pandjaitan, SH, MH di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, kemarin.

Selain itu, e-Planing dikenal dengan nama e-PapuaPu Rencana, program ini digunakan pada masa penyusunan dokumen rencana baik menengah dan tahunan serta mengintegrasikan antara dokumen rencana dan anggaran

serta sarana bagi usulan masyarakat sebagai bahan informasi perencanaan daerah serta menghasilkan 'dokumen-dokumen RPJMD, rencana strategis OPD, RPKD, Rencana OPD dan KUA-PPAS.

"Untuk e-budgeting atau dikenal dengan nama e-PapuaPu Anggaran ini bermanfaat karena penyusunan anggaran lebih cepat, standarisasi harga dan biaya, mekanisme check and balance, ini digunakan pada masa penganggaran berdasarkan hasil integrasi dari system perencanaan pembangunan serta menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan biaya standar," sebutnya.

Dengan sistem e-Government terintegrasi ini tentu semakin memudahkan kerja dari Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam mengintegrasikan program, karena di setiap kabupaten/kota ada openoffice dimana admin tinggal membuka kamus program, kegiatan dan indikator, selanjutnya memilih pilihan usulan untuk Musrenbang dari usulan kabupaten/kota, kemudian masuk pembahasan.

Dalam pembahasan ini akan diketahui apakah disetujui atau tidak, yang dilakukan oleh penyelia per bidang Bappeda, jika disetujui maka dapat menjadi dokumen Musrenbang. Lantas bagaimana sistem perijinan investasi dalam hal ini e-PapuaPuPerizinanOnline dan system pendapatan daerah atau e-Samsat. Berti edisi selanjutnya. (bersambung)

Judul : KPK Ingatkan Pemprov Implementasikan E-Government

Sumber : Harian Cenderawasih Pos

Tanggal : 09 Maret 2017

KAMIS | 09 MARET 2017

KPK Ingatkan Pemprov Implementasikan E-Government

Dari Launching E-Government Pempov Papua

JAYAPURA. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan, Irjen (purn) Basaria Pandjaitan, SH, MH meminta Pemerintah Provinsi Papua agar E-Government yang diluncurkan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, benar-benar diimplementasikan. ▶ Baca KPK... Hal 5



LAUNCHING-Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH bersama Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Irjen (purn) Basaria Pandjaitan, SH, MH, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Ijen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sri Wahyuningih, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dr.Ir.Taufik Hanaf, MUP ketika meluncurkan E-Government dan membuka Forum Pembangunan Daerah Provinsi Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Rabu (8/3).

■ KPK...

Sambungan dari hal 1

Tertutama dalam menparangi tindak pidana korupsi karena adanya transparansi dalam setiap pelayanan publik.

Basaria optimis sesuatu pekerjaan jika sudah dimulai harus diyakini dan dipercaya berjalan dengan baik. "Jadi nantinya hal ini mungkin belum 100 persen berjalan karena baru saja diluncurkan. Namun sesuai dengan harapan Gubernur Papua Lukas Enembe akan mengurangi (tindak pidana korupsi)

dengan transparansi," katanya disela-sela acara launching E-Government dan pembukaan Forum Pembangunan Daerah Provinsi Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Rabu (8/3).

Dirinya menyebutkan sebenarnya e-Government ini merupakan salah satu alat keterbukaan sehingga setiap orang nantinya akan mengetahui dari awal penganggaran sampai pemakaiannya. "Dengan begitu, kemungkinan kecil untuk berbuat korupsi itu memang diharapkan terjadi apabila benar-benar

dilaksanakan," ujarnya.

Basaria mengingatkan bahwa E-Government ini merupakan salah satu alat, sehingga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi tindak pidana korupsi.

Senada dengan itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH meyakini bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan salah satu misi Pemprov Papua yang dilaksanakan untuk menjadikan Papua dan masyarakatnya untuk bangkit, mandiri dan sejahtera.

Lukas Enembe menjelaskan

upaya perbaikan terus dilakukan dengan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran daerah, sistem perijinan serta sistem pelayanan Samsat secara online.

Dengan penerapan ketiga sistem tersebut, Gubernur Enembe berharap bahwa pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota di Papua akan menjadi lebih efisien, efektif, akuntabel serta transparan.

"Pelayanan yang efektif dan efisien akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Transparansi akan memudahkan mekanisme akuntabilitas

seluruh di mana masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan," jelasnya.

Ditambahkan, beberapa aplikasi sistem elektronik perencanaan, perijinan dan layanan samsat yang diberlakukan. Sistem ini merupakan milik kita bersama, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota serta seluruh perangkat daerah.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dr.Ir.Taufik Hanaf, MUP mengaku, Provinsi Papua merupakan provinsi keempat di Indonesia yang meluncurkan E-Government.

"Tidak banyak provinsi yang telah meluncurkan E-Government, jumlah provinsi yang telah meluncurkan baru 3 provinsi, Papua merupakan provinsi keempat," katanya.

Pilihannya menurut baik peluncuran ini, sebab di dalam E-Government ada komponen yang tidak kalah pentingnya yakni keoptimalan perencanaan dan penganggaran. Ini sangat penting bahwa untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.

"E-Governance ini sangat penting untuk memastikan apa yang direncanakan itu dapat sejalan dipergunakan, inilah salah satu instrumen pentingnya manfaat dari e-Government," ungkapnya.

Namun peluncuran E-Government ini bukan akhir tetapi baru tahap awal bagaimana ini dilaksanakan dipergunakan.

"Ternyata yang kita saksikan hari ini, baru tahap awal. Komitmen Pemerintah provinsi

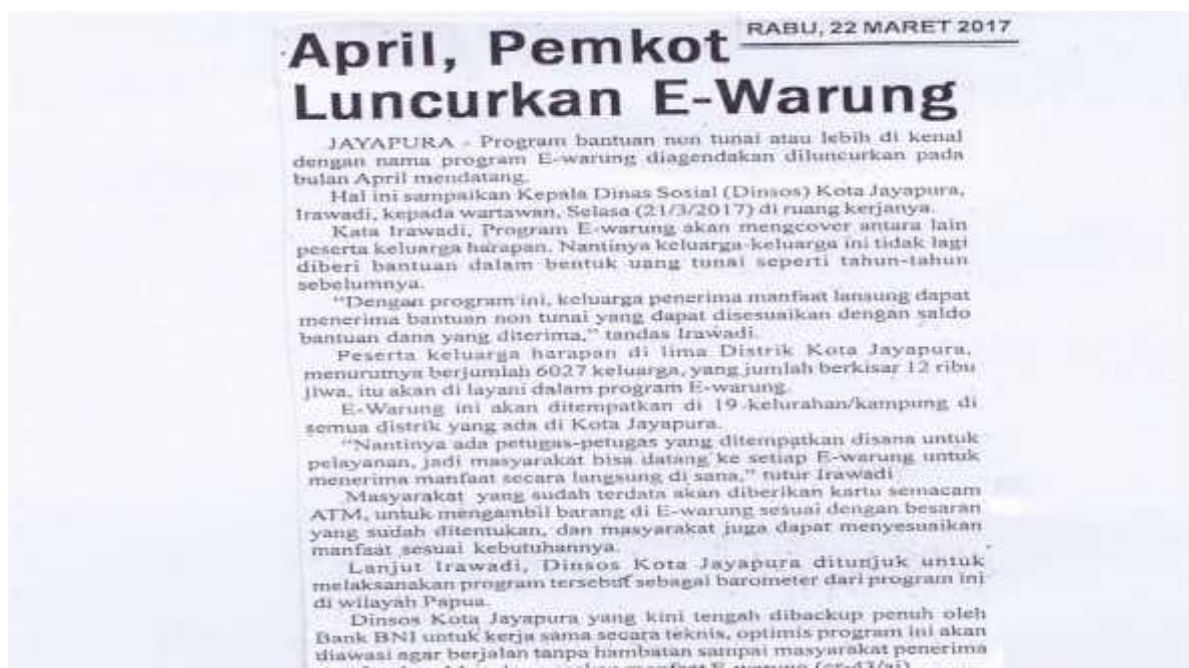


Judul : - April, Pemkot Luncurkan E-Warung

- Polri Gandeng Kemeninfo Ungkap Kasus Pedofil Di Medsos

Sumber : Harian Cenderawasih Pos

Tanggal : 22 Maret 2017



Judul : Dinsos Gelar Sosialisasi E – Warong Bagi PKH

Sumber : Harian Cenderawasih Pos

Tanggal : 30 Maret 2017

Cenderawasih Pos, Kamis, 30 Maret 2017

Dinsos Gelas Sosialisasi E-Warong Bagi PKH

JAYAPURA - Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Sosial menggelar sosialisasi pelaksanaan E-Warong Kube bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang berlangsung di Kantor Dinas Sosial, Kota Jayapura, Rabu (29/3) kemarin.

Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Irawadi, dalam

sambutannya mengatakan, program ini telah dilakukan di Jawa dan di Provinsi Papua baru pertama kali diberikan untuk Kota Jayapura.

"Program ini bertujuan mensejahterahkan mama-mama penerima PKH," ujarnya.

Dikatakan, program yang direncanakan diserahkan secara non tunai itu,

Pemerintah Kota Jayapura, akan siapkan 19 warong. "Akan disiapkan 19 warong (warung)," katanya Irawadi.

Dikatakan, peserta program keluarga harapan berjumlah 4700 lebih setelah ada penambahan jumlah keseluruhan 6027 penerima manfaat.

"Program ini langsung dari Kementerian Sosial dengan

mengutamakan PKH dan semua penerima manfaat akan menerima," ujarnya.

"Para penerima keluarga harapan akan dibagikan di 19 kelompok dengan lokasi yang akan ditetapkan, dimana tempat adanya e-warong ini didirikan," katanya.

Ia menambahkan, nantinya ada 54 pendamping, sebelum-

nya dalam PKH akan menjadi tempat koordinasi tetapi yang terdepan penyelia dan pendamping yang nanti mengontrol berjalannya proses bantuan.

"Rencana E-Warong ditempatkan di Jayapura utara ada 6, Jayapura Selatan ada 6, Abe 5 dan Muara Tami 2, yang telah dipertimbangkan dengan jangkauannya," ujar Irawadi.

Ia mengatakan, e-warong ini akan menggunakan pembayaran elektronik sama dengan ATM, dan barangnya langsung disediakan berupa Sembako.

"Barang disiapkan sesuai petunjuk. Ada lima jenis pertama beras, tepung, minyak, ada gula pasir, kemudian ada telur," ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan Bank Negara, BUMN, Kepala Kantor Bank BNI Kantor Entrop, Samsul Rasid, mengatakan BNI bekerja sama dari sisi, e-warong kube, atau elektronik warung merupakan kelompok usaha bersama, dimana perekonomian itu dia berpusat ke kota, tetapi di daerah pinggiran.

"Mengangkat daerah pinggiran kepada masyarakat, karena gula, beras, terigu, dan minyak ini bahan-bahan yang dibutuhkan," ujarnya. Ia berharap program ini bisa berkelanjutan dengan mengangkat perekonomian masyarakat. (oel/nan)



Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Irawadi saat memberikan sosialisasi E Warong kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura, Rabu (29/3).

Judul : 2018, Semua Distrik Sudah Nikmati Jaringan Komunikasi

Sumber : Harian Cenderawasih Pos

Tanggal : 30 Maret 2017

Cenderawasih Pos,
Kamis, 30 Maret 2017

2018, Semua Distrik Sudah Nikmati Jaringan Komunikasi



Kabupaten Keerom untuk distrik yang belum ada jaringan komunikasi kita usahakan nantinya sudah ada jaringan komunikasi, yang bisa dilakukan melalui pemasangan jaringan fiber optic,"katanya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Bupati Keerom, Rabu (29/3)kemarin.

Memang di Kabupaten Keerom, saat ini untuk distrik yang sudah masuk jaringan Komunikasi melalui telepon seluler diantaranya ada di Distrik Arso, Arso Barat, Skanto, Arso Timur, Waris, namun untuk di Distrik Senggi, Web, Towe, Keisnar dan Yapi baru beberapa kampung saja yang sudah menikmati jaringan komunikasi melalui telepon seluler.

Hal lain yang dikatakan Megiken, selain fokus pada komunikasi, nantinya ia juga fokus pada pembuatan Web untuk setiap kampung sehingga kampung tersebut bisa diakses melalui web yang

Megiken Bangun

KEEROM-Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Keerom Megiken Bangun, berharap di tahun 2018 mendatang semua distrik tentunya akan memberikan dampak positif dan banyak manfaat di daerah itu antara lain tidak adanya keterisolasian komunikasi, masyarakat bisa

PRYADICEPOS

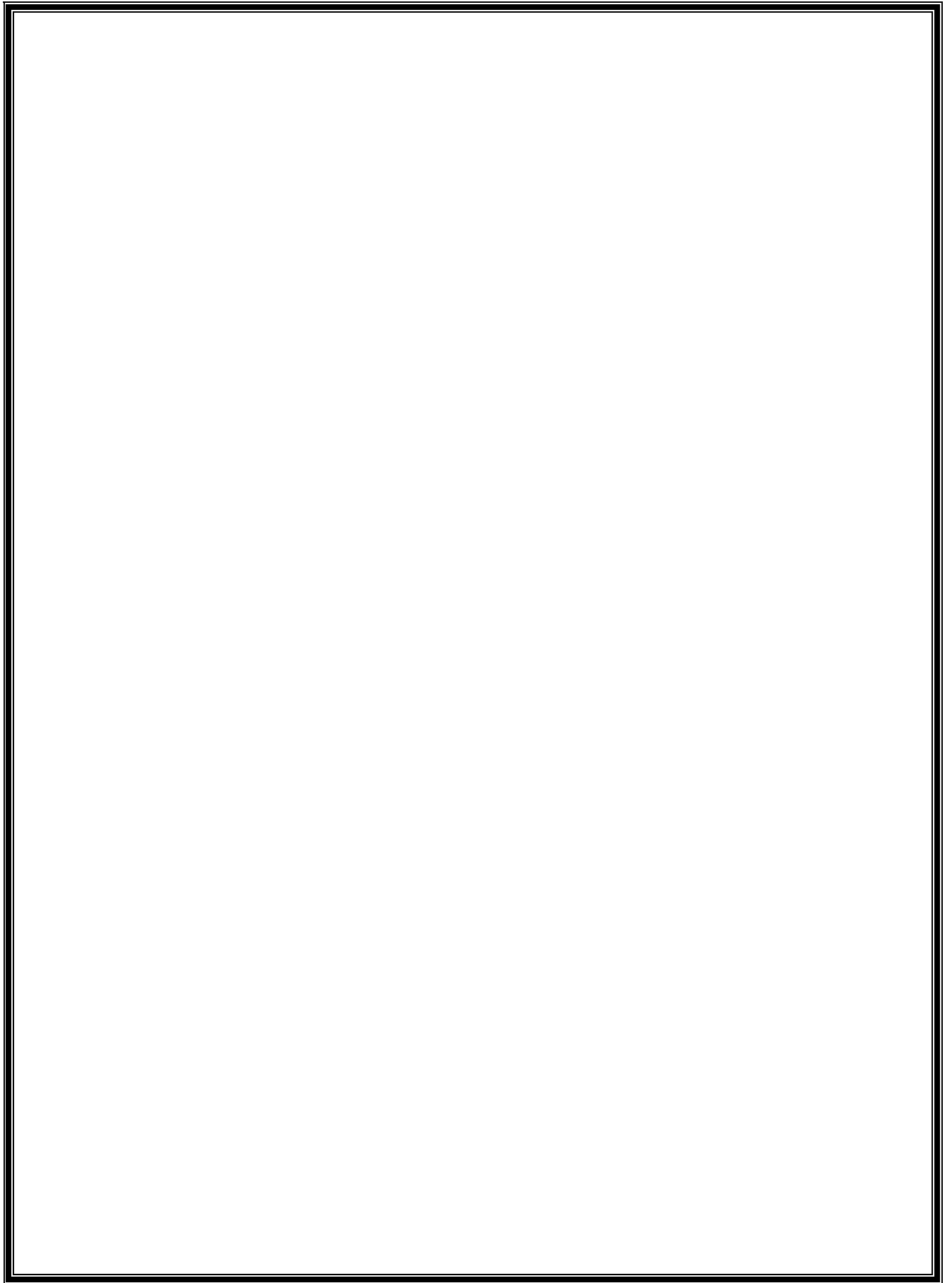


Judul : Kominfo Siapkan Aplikasi Informasi Untuk Asia Games

Sumber : Harian Cenderawasih Pos

Tanggal : 31 Maret 2017





Judul : Kominfo Papua Akan Fasilitasi Kabupaten/Kota Manfaatkan Aplikasi Berbasis Web

Sumber : Harian Papua Pos

Tanggal : 16 November 2016

Kominfo Papua Akan Fasilitasi Kabupaten/Kota Manfaatkan Aplikasi Berbasis Web

JAYAPURA [PAPOS] - Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua akan memfasilitasi kabupaten dan kota agar dapat memanfaatkan aplikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Aplikasi Absensi Digital dan Daerah Tambahan Penghasilan Berasyarakat (TPB) berbasis Web.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Papua, Kansiana Salle, SH kepada wartawan usai sosialisasi aplikasi berbasis Web di Aula Kominfo Papua, Selasa (15/11) kemarin menyatakan, pihaknya tahun ini telah membangun aplikasi LPPD sementara aplikasi absensi digital, TPB dan sistem aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berbasis web sebelumnya telah dibangun.

"Kami berharap aplikasi yang telah diuji coba atau dibangun oleh Dinas Kominfo dapat dimanfaatkan

oleh SKPD Di lingkungan pemprov Papua dan kabupaten/kota," jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya berbagai aplikasi yang telah tersedia tersebut dapat dimanfaatkan oleh kabupaten/kota, sebab aplikasi ini berguna untuk mempermudah kontrol berupa laporan hasil kinerja SKPD melalui system.

"Sehingga menjadi cepat dan terdokumentasi dengan baik, disamping itu juga aplikasi absensi TPB ini merupakan control pimpinan pada bawahan dalam rangka menegakan disiplin pegawai dalam masuk dan pulang kantor serta mendorong peningkatan kinerja bagi setiap PNS, begitupun dengan aplikasi SP-SPPD," kata Kansiana Salle.

Dia menuturkan tujuan dibuatnya aplikasi perjalanan dinas berbasis web ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan transparan.

"Perlu dilakukan reformasi

dalam semua bidang lingkup pemerintahan termasuk penyiapan administrasi keuangan perjalanan dinas baik di dalam maupun keluar daerah pada setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemrov Papua," terangnya.

Dengan adanya aplikasi ini, semua data akan terpusat dan terkendali serta terjadi transparan mulai dari proses pengusulan, penertiban SPPD sampai dengan proses pelaporan hasil perjalanan dinas yang semuanya harus terintegrasi dalam satu sistem aplikasi perjalanan dinas.

Disinggung mengenai kabupaten/kota yang telah menikmati jaringan optik, Kansiana Salle mengaku, wilayah pesisir seperti kabupaten Mimika, Merauke dan Biak serta Kota Jayapura telah menikmati jaringan melalui kable optik.

"Termasuk kabupaten Sarmi, namun belum diketahui optimalisasinya sejauhmana," katanya lagi.

[tho]



Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Papua, Kansiana Salle, SH

Judul : Menkominfo Akui Internet di Papua Mahal

Sumber : Harian Papua Pos

Tanggal : 24 Februari 2017



YAMANDERCEPOS

Menkominfo Ir. H. Rudiantara, MBA didampingi Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH ketika memberikan keterangan pers di Pressroom Kantor Gubernur Papua, kemarin.

Menkominfo Akui Internet di Papua Mahal

JAYAPURA-Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Ir. H Rudiantara, MBA mengakui bahwa penggunaan internet di Papua tergolong mahal. bahkan pihaknya pernah mendapat petisi dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat di Papua terkait hal ini. ▶ *Baca Menkominfo... Hal 5*

■ MENKOMINFO... *Sambungan dari hal 1*

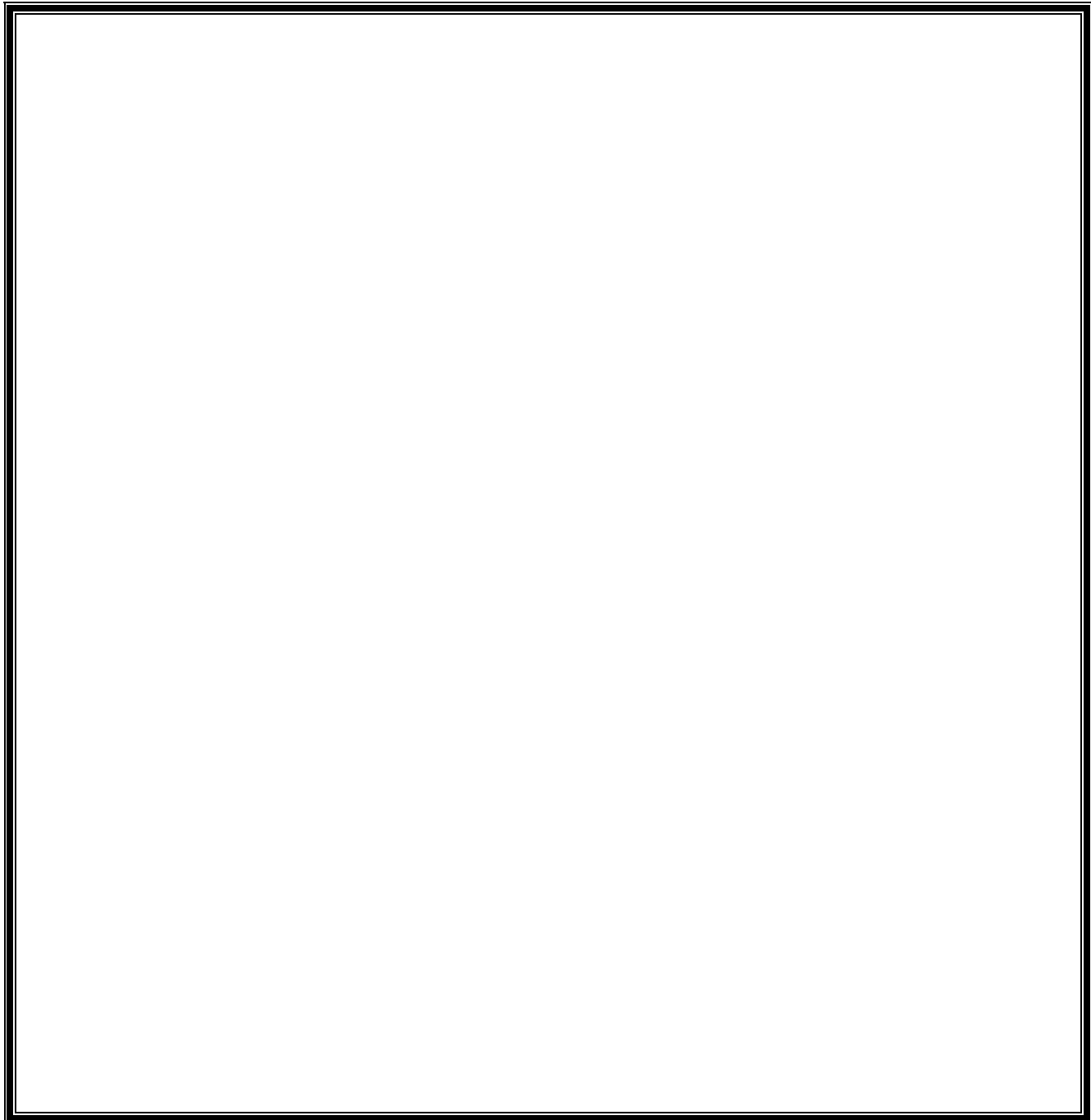
"Memang kami pernah mendapat petisi dari salah satu LSM terkait mahalnya penggunaan internet di Papua yang mencapai 65 persen. Ini tentu lebih mahal dengan dari daerah yang lain di Indonesia," unekannya saat memberikan

Kantor Gubernur Papua, kemarin (23/2).

Menkominfo Rudiantara tidak menampik adanya monopoli salah satu provider di Provinsi Papua." Ya memang untuk Telkom kami minta agar bisa memperluas jaringan, dan anak perusahaannya menjadi salah satu provider termuka di Provinsi Papua," ujarnya.

"Kalau seluruh daerah tersambung, maka dipastikan akan memudahkan operator untuk mengembangkan sayap serta penggunaan internet semakin murah, hal ini telah berlaku di daerah Jawa," sebutnya.

Menyoal sering putusnya fiber optic, Menkominfo mengakui bahwa hal tersebut merupakan faktor alam yang

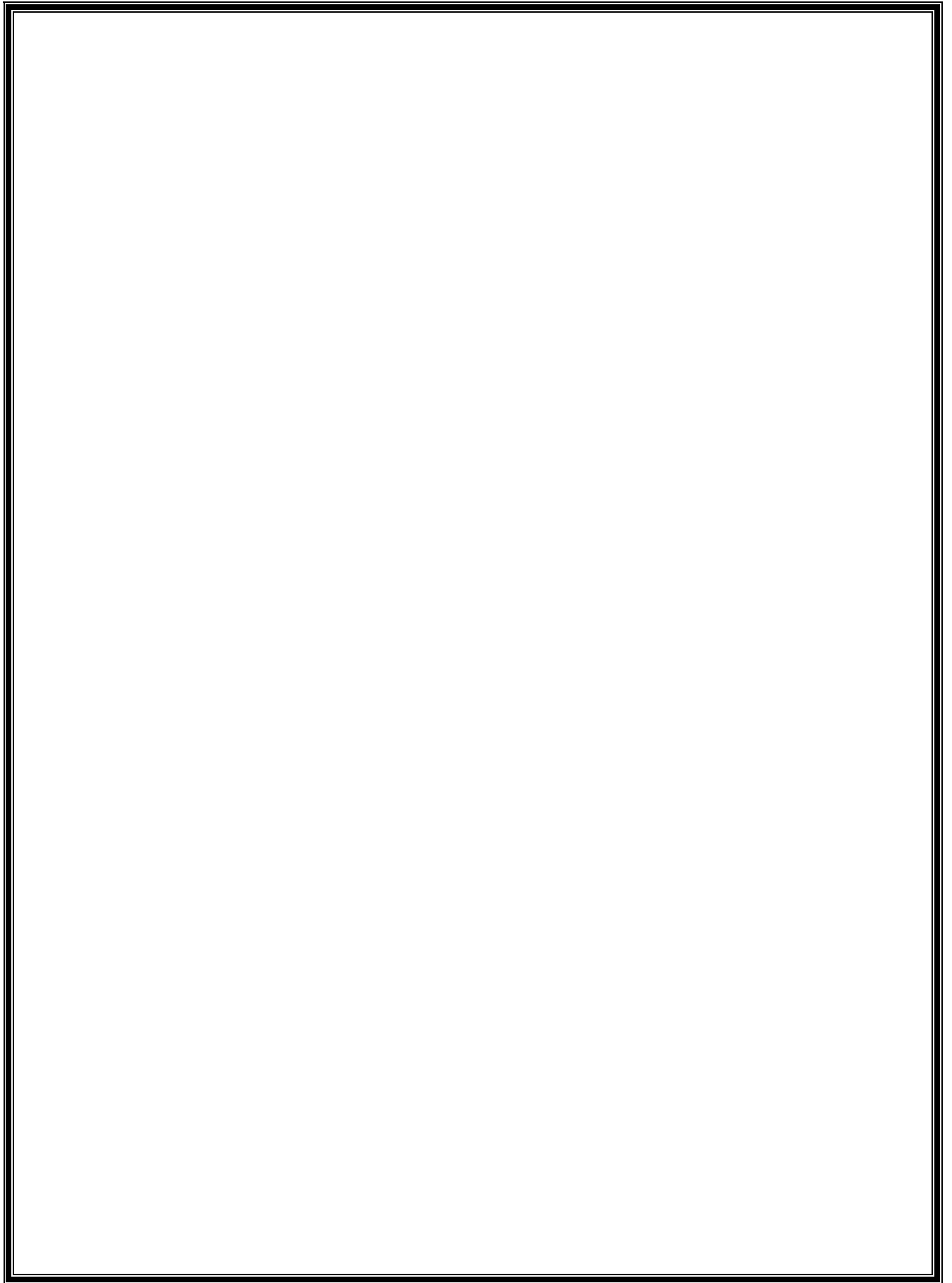


Judul : Gubernur Minta Bupati dan Walikota Dukung Proyek Palapa Ring

Sumber : Harian Papua Pos

Tanggal : 24 Februari 2017





Judul : Gubernur Minta Bupati dan Walikota Dukung Proyek Palapa Ring

Sumber : Harian Papua Pos

Tanggal : 24 Februari 2017



Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama Gubernur Papua Lukas Enembe, S.I.P.M.

KPK Gandeng APIP Awasi Penggunaan Anggaran di Daerah

JAYAPURA [PAPOS] – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran tingkat provinsi maupun kabupaten dan Kota.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam arahannya pada peluncuran E-Government dan forum pembangunan Papua di Sasana Krida kantor Gubernur, Rabu (8/3/2017) kemarin.

"Kita berharap jangan sampai para inspektori dan para pengawas intern tidak ada gunanya. Jadi harapan kita seluruh APIP menjadi mitra dari KPK, termasuk juga para rekan-rekan BPKP yang ada pada tingkat daerah. Ini menjadi mitra kita di dalam mengawal seluruh dana pada tiap-tiap daerah agar dimanfaatkan sesuai yang seharusnya," tegasnya.

Ia mengharapkan kedepan dengan diterapkannya e government di Bumi Cenderawasih, Papua mampu menjadi

contoh bagi daerah lainnya di Indonesia bagian timur.

"Semoga Papua bisa menjadi yang terbaik di antara provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Bila perlu mampu bersaing dengan Provinsi Jawa Barat, sehingga kedepan Papua mampu menjadi yang terdepan di Indonesia timur, sekaligus melatih daerah yang belum menerapkan e government tersebut," harap dia.

Pada kesempatan itu, Basaria mengapresiasi launching e-government Papua dimana, Papua menjadi provinsi yang keempat dalam peluncuran program dan aplikasi tersebut.

Ia berharap, pada 2018 seluruh Provinsi di Indonesia sudah dapat menerapkan program ini. Sebab melalui program dan aplikasi ini, baik masyarakat dan aparat pemerintah daerah akan mendapat banyak kemudahan.

"Intinya kami mendukung dan siap berada di sisi memberikan pendampingan. Supaya implementasi e government ini bisa berjalan dengan baik," katanya (huf).



Papua Merupakan Provinsi Ke-Empat Luncurkan E-Government

JAYAPURA [PAPOS] – Staf Ahli Bidang Penelitian dan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dr. Ir. Daudk Hanuf, M.P. mengaku, Provinsi Papua merupakan provinsi ke-empat di Indonesia yang meluncurkan E-Government.

"Tidak banyak provinsi yang telah meluncurkan E-Government, tiga provinsi yang sebelumnya meluncurkan E-Government adalah Jawa Barat, Bengkulu dan Sumatera Utara telah, Papua merupakan provinsi ke-empat," ungkapnya dalam Peluncuran E-Government Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Rabu (8/3/2017) kemarin.

Ia menyambut baik peluncuran ini, sebab di dalam E-Government ada komponen yang tidak kalah pentingnya yakni komponen perencanaan dan penganggaran, ini sangat penting bahwa untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.

"E-Governance ini sangat penting untuk memastikan apa yang direncanakan itu dapat terjadi di lapangan, inilah salah satu instrumen pentingnya manfaat dari E-Governance," ungkapnya.

"Tadi disampaikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa memberikan kesejahteraan seluas-luasnya bagi masyarakat provinsi Papua, E-Governance merupakan semangat dari salah satu tersebut," lanjutnya. Namun peluncuran E-Government ini bukan akhir, tetapi harus tahap awal bagaimana ini dilaksanakan di lapangan nanti.

"Ternyata yang kita sukakan hari ini, baru tahap awal. Komitee Pemerintah provinsi Papua untuk meningkatkan dan mendekatkan layanan salah satunya bidang kesehatan dan pendidikan juga akan memanfaatkan teknologi contohnya di

sama dengan Kementerian Kesehatan akan memanfaatkan teknologi informasi apalagi sudah ada palapa ring di Papua untuk mengembangkan telemedicine yaitu bagaimana mendekatkan layanan kesehatan di Papua yang mempunyai letak geografis sangat luas, inilah kesehatan tenaga kesehatan belum merata.

"Maka layanan ini akan sangat mendorong mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, jadi komunikasi antara satuan-satuan layanan kesehatan mulai dari rumah sakit sampai puskesmas akan sangat terbantu dengan adanya pemanfaatan teknologi yang salah satu komponennya adalah telekomunikasi dan informasi," terangnya.

Untuk bidang pendidikan, Bappenas akan memanfaatkan kearifan lokal yang ada di Tanah Papua. Sebab, persiapan di Papua ini sebagian besar adalah lulusan dari sekolah-sekolah berstrata. Lulusan-lulusan sekolah berstrata yang ada di Papua untuk itu pengembangan dan penguatan sekolah berstrata di Papua juga akan diperkuat. "Kami sangat bangga bahwa provinsi Papua merupakan provinsi yang keempat meluncurkan E-Governance ini akan memperkuat mulai dari perencanaan, perencanaan dan penganggaran serta akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas," tegasnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Papua Hery Doyinon, S.I.P.M. KPK mengatakan, e-Government merupakan rencana aksi dan break down KPK. "Sudah ada tahapan yang kita lakukan, MoU dengan Kota Surabaya dan Jawa, E-sangat untuk pendataan dan perizinan. Ini bermula pada e-government. Kita udah melatih semua pemda di sini untuk bisa lakukan e-government." kata dia. Nantinya ada kesepakatan integritas semua stakeholder, kab

Judul : - Kemendagri Bentuk Tim Pembina Aplikasi “e-Planning”
- Kemendagri Bentuk Tim Pembina E-Planning

Sumber : Harian Papua Pos

Tanggal : 09 Maret 2017

Kemendagri Bentuk Tim Pembina Aplikasi “e-Planning”

JAYAPURA [PAPOS] - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk tim pembina aplikasi “e-planning” dalam perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, guna merespon kebijakan penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan yang efektif.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sri Wahyuningsih, di Jayapura, Rabu, mengatakan pembentukan tim pembina aplikasi “e-planning” itu sebagai respon atas tujuh

masalah substansial terkait penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. “Tim ini merupakan desk atau tempat bagi seluruh pemerintah daerah (pemda) berkonsultasi terkait penerapan ‘e-planning’ yang masuk dalam sistem ‘e-government’,” katanya.

Menurut Sri, kebijakan ini juga mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan aplikasi “e-planning” dalam setiap pembangunan daerah mulai 2017 sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 640/3761/SJ pada 10 Oktober 2016. [ant]

Kemendagri Bentuk Tim Pembina E-planing

JAYAPURA [PAPOS] – Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sri Wahyuningsih pihaknya, membentuk tim pembina aplikasi E-planing dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi, kabupaten dan kota.

“Tim ini merupakan desk atau tempat bagi seluruh pemda berkonsultasi terkait penerapan e-planing,” ungkapnya, pada peluncuran E-Government dan Forum Pembangunan Papua, di Sasana Krida kantor Gubernur Papua, Rabu (8/3/2017) kemarin.

Ini sebagai komitmen Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2013 intensif di awal 2016 telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka menghadirkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang efektif yakni,

Untuk itu, diwajibkan seluruh pemerintah daerah

Judul : Menkominfo: Kalau Incar Jangkauan, Tunggu 700 MHz 'Merdeka'

Sumber : Harian Papua Pos

Tanggal : 18 Maret 2017

SABTU
18 MARET 2017

Menkominfo: Kalau Incar Jangkauan, Tunggu 700 MHz 'Merdeka'

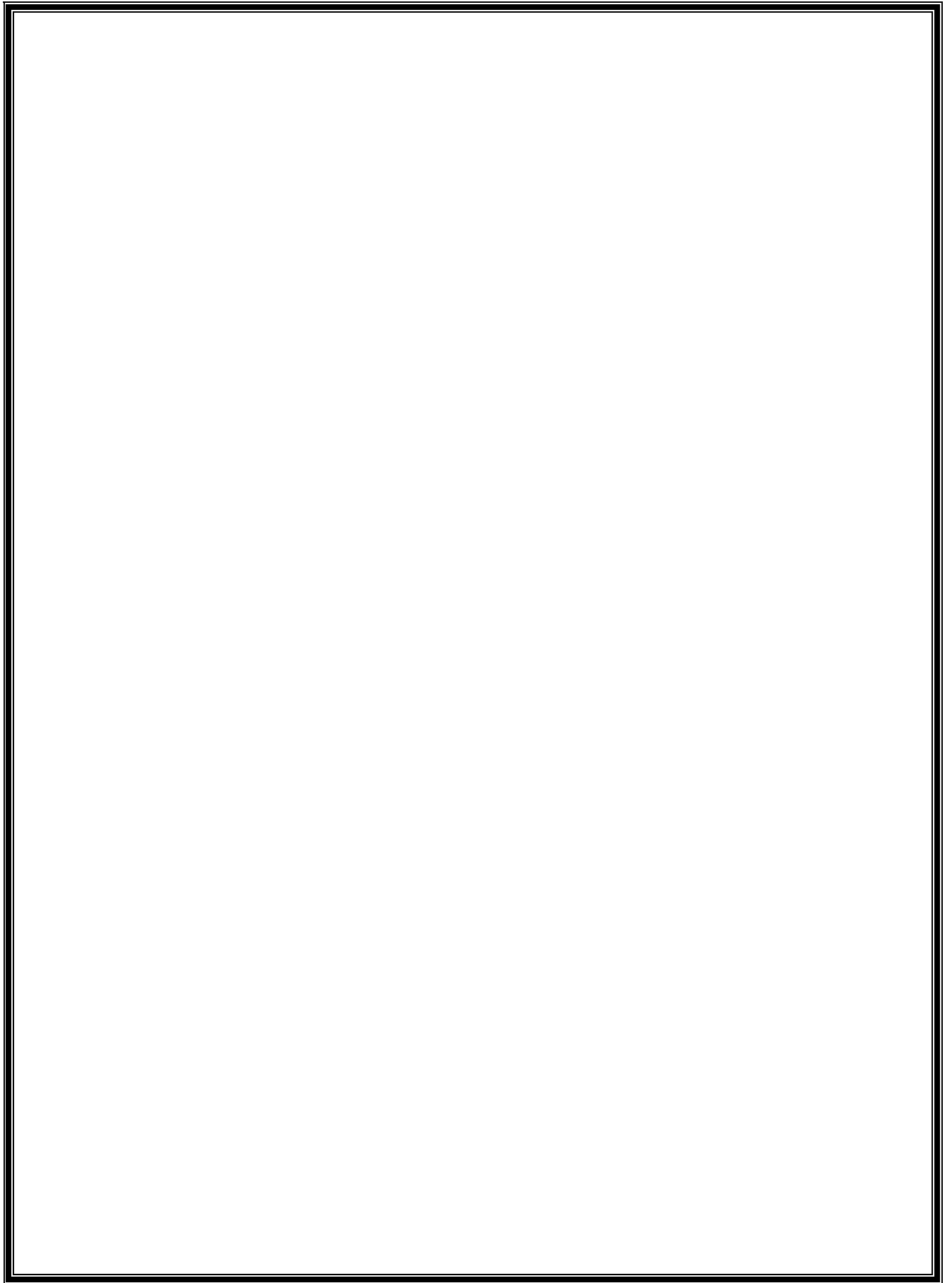
JAKARTA | PAFOS |
Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kominfo)
telah memetakan mana pita
frekuensi yang digunakan

Undang-Undang Penyiaran
sebagai digital dividen.

Nanti kalau semua berjalan
lancar, spektrum 700 MHz itu
direncanakan dialokasikan

untuk Sumber Daya Manusia
(SDM).

"Mumpung nanti dapat
digital dividen harus ada
kebijakan keberpihakan



Judul : Pelaku Usaha Biak Diajak Manfaatkan Internet

Sumber : Harian Papua Pos

Tanggal : 29 Maret 2017

RABU, 29 MARET 2017

Pelaku Usaha Biak Diajak Manfaatkan Internet

BIAK [PAPOS] - Asisten II Sekretaris Daerah Biak Numfor, Papua Mahasunu SIP mengajak para pelaku usaha mikro kecil menengah di daerahnya untuk memanfaatkan fasilitas kemajuan teknologi internet dalam memasarkan beragam hasil produk usahanya.

"Pemkab Biak Numfor melalui rumah kreatif BUMN telah menyediakan fasilitas teknologi internet untuk pemasaran produk usaha mikro kecil menengah," kata Asisten II bidang ekonomi pembangunan Biak Numfor, di Biak, Senin.

Menurut Mahasunu, dengan



Pedagang Mama Papua di pasar Darfuar Biak.

bantuan pemasaran produk usaha lewat teknologi internet belanja.com yang disediakan rumah kreatif BUMN, diharapkan pemasaran produk usaha Biak dapat dikenal ke berbagai daerah hingga ke luar

negeri.

Kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Biak, menurut Mahasunu, diharapkan dapat menggunakan teknologi internet yang sudah disediakan rumah kreatif BUMN untuk

membantu percepatan informasi pemasaran produksi dalam jaringan (online).

Potensi produksi dihasilkan para pelaku UMKM Biak, menurut Mahasunu, berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha

Kecil Menengah Biak sangat beragam dan terdapat di sejumlah kampung dan distrik di Kabupaten Biak Numfor.

"Berbagai produk usaha kecil yang sudah di pasaran berbagai jenis aksesoris hiasan bahan baku lokal, sagu, abon ikan, tas noken, ikan julung asap serta cemilan makanan dapat dipasarkan melalui belanja.com," kata Mahasunu pula. Prospek pemasaran pelaku usaha melalui jasa teknologi informasi internet, menurut Mahasunu, sebagai cara baru yang mulai diperkenalkan oleh rumah kreatif BUMN untuk meningkatkan pendapatan keluarga setempat.

Berdasarkan data rumah kreatif BUMN yang sudah dioperasikan BNI 46 sejak Desember 2016 sudah menyediakan fasilitas internet untuk membantu pemasaran produk UMKM melalui belanja.com. [ant]



KECENDERUNGAN BERITA DAN OPINI PUBLIK

TRIWULAN PERTAMA

No	Judul/Tema Berita	Sumber	Kategori	Kecenderungan
1.	Optimis Implementasikan e-Government	Harian Cenderawasih Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif
2.	Memberdayakan Kampung Melalui TIK	Harian Cenderawasih Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif
3.	Launching e-Government Terintegrasi dimatangkan	Harian Cenderawasih Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif

4.	Siap Terapkan Sasaran Kinerja Pegawai Online	Harian Cenderawasih Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif
5.	KI Papua Dorong Setiap Badan Publik Miliki Website	Harian Cenderawasih Pos	Komunikasi Publik	Positif
6.	Siap Dilaunching, Bertujuan Hindari Praktik Korupsi	Harian Cenderawasih Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif
7.	Kabupaten Diminta Dukung Proyek Papua Ring	Harian Cenderawasih Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif
8.	Diskominfo Bagikan 742 Antena TV Kepada Masyarakat	Harian Cenderawasih Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif

9.	Internet Gratis, Direspon Pelajar dan Mahasiswa	Harian Cenderawasih Pos	Komunikasi Publik	Positif
10.	Tahun Terakhir, Sarana Komunikasi Bisa dirasakan Semua Masyarakat	Harian Cenderawasih Pos	Komunikasi Publik	Positif
11.	Menuju Smart City, Jayapura Akan Gunakan Palapa Ring	Harian Cenderawasih Pos	Komunikasi Publik	Positif
12.	Dari Launching e-Government Pemerintah Provinsi Papua	Harian Cenderawasih Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif
13.	KPK Ingatkan Pemprov Implementasi e-Government	Harian Cenderawasih Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif
14.	April, Pemkot Luncurkan E-Warung	Harian Cenderawasih Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif
15.	Polri Gandeng Kemkominfo Ungkap Kasus Pedofil Dimedsos	Harian Cenderawasih Pos	Komunikasi Publik	Positif
16.	Dinsos Gelar Sosialisasi E-Warung Bagi PKH	Harian Cenderawasih Pos	Komunikasi Publik	Positif
17.	2018, Semua Distrik Sudah Nikmati Jaringan Komunikasi	Harian Cenderawasih Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif

18.	Kominfo Siapkan Aplikasi Informasi Untuk Asian Games	Harian Cenderawasih Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif
19	Kominfo Papua Akan Fasilitas Kabupaten/ Kota Memanfaatkan Aplikasi Berbasis Web	Harian Papua Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif
20	Menkominfo Akui Internet di Papua Mahal	Harian Papua Pos	Komunikasi Publik	Positif
21	Gubernur Minta Bupati dan Walikota Dukung Proyek Palapa Ring	Harian Papua Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif
22	KPK Gandeng APIP Awasi Pembangunan Anggaran di Daerah	Harian Papua Pos	Komunikasi Publik	Positif
23	Papua Merupakan Provinsi ke-Empat Luncurkan E-Government	Harian Papua Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif
24	Kemendagri Bentuk Tim Pembina Aplikasi "e-Planning"	Harian Papua Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif
25	Kemendagri Bentuk Tim Pembina E-Planing	Harian Papua Pos	Teknologi Komunikasi Dan Informatika	Positif
26	Menkominfo : kalau Incar Jangkauan, Tunggu 700 MHz Merdeka	Harian Papua Pos	Komunikasi Publik	Positif
27	Pelaku Usaha Biak Diajak Manfaatkan Internet	Harian Papua Pos	Komunikasi Publik	Positif